



Open Access

PEMBERDAYAAN PETANI BAWANG MELALUI EDUKASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PENGEMBANGAN OLAHAN AGRIBISNIS

Nando Dwi Kurniawan^{*1}, Triyan Bayu Pratama², Agung Abdul Rahman Wiyono³

^{1,2,3} Universitas Panca Marga, Probolinggo, Indonesia

*Corresponding Author: nando.kurniawan@upm.ac.id

<p>Info Article</p> <p>Received : 01 Maret 2026</p> <p>Revised : 04 April 2026</p> <p>Accepted : 01 Mei 2026</p> <p>Publication : 31 Mei 2026</p> <hr/> <p>Keywords: <i>Empowerment of onion farmers, Intellectual Property Rights, Agribusiness Processing, Product added value, Branding and Marketing.</i></p> <p>Kata Kunci: Pemberdayaan petani bawang, Hak Kekayaan Intelektual, Olahan Agribisnis, Nilai tambah produk, Branding dan Pemasaran</p> <hr/> <p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	<p>Abstract: <i>Empowering onion farmers is essential to increase product added value and strengthen the competitiveness of local agribusiness. Farmers commonly face challenges such as limited understanding of Intellectual Property Rights (IPR), lack of innovation in processed products, and suboptimal marketing strategies. This community service program aims to enhance farmers' capacity through IPR education and the development of locally based agribusiness products. A participatory method was applied, including counseling, training, assistance in processing onion-based products, and socialization on trademark protection and product packaging. The results show improved farmer awareness of IPR, particularly trademark registration, along with enhanced skills in producing value-added products such as packaged fried onions, chili onion sauce, and other derivatives. Additionally, farmers have begun to understand that effective marketing strategies and product branding can increase economic value, independence, and sustainable competitiveness.</i></p> <p>Abstrak: Pemberdayaan petani bawang menjadi penting dalam meningkatkan nilai tambah produk serta daya saing agribisnis lokal. Permasalahan yang dihadapi petani umumnya meliputi rendahnya pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), keterbatasan inovasi produk olahan, serta belum optimalnya strategi pemasaran. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani bawang melalui edukasi Hak Kekayaan Intelektual dan pengembangan olahan agribisnis berbasis potensi lokal. Metode yang digunakan adalah Partisipatif yaitu meliputi penyuluhan, pelatihan, pendampingan pembuatan produk olahan bawang, serta sosialisasi perlindungan merek dan kemasan produk. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman petani mengenai pentingnya HKI, khususnya pendaftaran merek serta meningkatnya keterampilan dalam mengolah bawang menjadi produk bernilai tambah seperti bawang goreng kemasan, sambal bawang dan produk turunan lainnya. Selain itu, petani mulai memahami strategi pemasaran dan branding produk olahan agribisnis dapat meningkatkan nilai ekonomi, kemandirian dan daya saing petani bawang secara berkelanjutan</p>
--	---

INTRODUCTION

Pada sektor pertanian merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama bagi masyarakat pedesaan yang menggantungkan kehidupan pada komoditas pertanian. Salah satu komoditas strategi yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah bawang, baik bawang merah maupun bawang putih. Namun di banyak daerah, petani bawang masih menghadapi berbagai permasalahan klasik seperti fluktuasi harga, ketergantungan pada tengkulak, keterbatasan inovasi produk dan minimnya pengetahuan mengenai perlindungan hasil inovasi. Sehingga kondisi tersebut menyebabkan posisi tawar petani tetap rendah, yang mengakibatkan potensi ekonomi dari komoditas bawang belum dimanfaatkan secara optimal.

Permintaan bawang akan terus meningkat (dengan perkiraan 5% per tahun) seiring dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat karena adanya penambahan penduduk, semakin berkembangnya industri makanan jadi dan pengembangan pasar ekspor bawang. (Riyanti, 2011). Para petani bawang yang juga sebagai pelaku usaha selain membutuhkan sumber daya manusia yang terampil, berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya, keterpaduan antara lahan secara optimal, penggunaan pupuk yang didukung oleh tenaga kerja yang mempunyai produktifitas tinggi, dan daya jual dari hasil pertanian tersebut sering dihadapkan pada berbagai masalah yang besar terhadap kelangsungan hidup petani. (Parinsi, 2017).

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Menurut hasil penelitian pada kegiatan pengabdian sebelumnya, maka kegiatan tersebut sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan. (Trimo et al., 2020)

Salah satu contoh pemberdayaan terhadap petani bawang yang dilakukan dimulai dengan meningkatkan kapasitas SDM dengan cara melaksanakan pelatihan dan penyuluhan secara menyeluruh, yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan bantuan pemahaman dalam penerapan inovasi penjualan hasil pertanian serta memperbaiki jaringan pasar yang ada di wilayah tersebut hingga menyediakan sarana

dan prasarana yang memadai bagi petani bawang. (Apriyanto, et al., 2013). Di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif, petani perlu juga dibekali dengan pengetahuan yang tidak hanya berkaitan dengan Teknik budidaya saja, tetapi juga pemahaman yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Petani yang juga sekaligus pelaku usaha UMKM juga perlu memiliki pengetahuan agar dapat mengolah hasil olahan bawang tersebut menjadi bermanfaat. Pengaturan HKI sendiri telah diatur pada hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta serta Undang -undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berkaitan pelaksanaan perlindungan terhadap komoditas pertanian yaitu bawang.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses sosial yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki kapasitas untuk mengelola sumber daya dan mengatasi permasalahan yang dihadapi secara mandiri (Hilman & Nimasari, 2018). HKI merupakan instrumen penting dalam melindungi karya, inovasi dan produk turunan dari hasil bawang tersebut yang dihasilkan oleh petani atau kelompok tani. Misalnya, inovasi dalam pengolahan bawang putih diproses menjadi aneka olahan, antara lain bawang goreng, pasta bawang, dan keripik bawang atau bumbu instan dapat didaftarkan sebagai merek atau desain kemasan untuk memberikan nilai tambah sekaligus perlindungan hukum terhadap produk tersebut. Namun pada kenyataannya, rendahnya literasi HKI di kalangan petani menyebabkan banyak inovasi yang tidak terdokumentasi sehingga para pelaku UMKM terutama UMKM dalam pengolahan produk bawang tidak bisa memiliki kepastian hukum dalam produk yang mereka buat.

Desa Pabean , Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pengelolaan komoditas bawang yang cukup besar, baik dari segi sumber daya alam maupun tenaga kerja. Meskipun demikian, sebagian besar petani di wilayah ini masih menghadapi keterbatasan dalam hal mengakses informasi, pemahaman tentang hak kekayaan intelektual serta bagaimana penerapannya dalam proses pemasaran yang modern sehingga untuk mendukung keberlanjutan usaha tani mereka. karena kedepan semakin banyak pesaing yang memasarkan merek atau produk yang sudah memiliki brand. Sedangkan para petani yang sudah lama merintis usaha hanya sebatas memiliki produk dan merek tanpa adanya kepastian hukum dalam produk tersebut sehingga rawan untuk ditiru oleh pesaing usaha lain. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada pembentukan petani yang cerdas hukum, mandiri, dan berdaya saing dalam sistem

agribisnis modern. Berbagai aspek pertanian dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, mulai dari pengaturan produksi hingga distribusi (Cahyani et al., 2025)

Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, sektor pertanian di bidang agribisnis tentunya masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan hasil olahan pertanian menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Namun demikian, kontribusi tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan nilai tambah produk pertanian. Komoditas bawang, baik bawang merah maupun bawang putih, sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah tanpa diferensiasi produk dan perlindungan merek, sehingga posisi tawar petani relatif lemah dalam rantai distribusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan aspek hilirisasi dan perlindungan hukum melalui instrumen HKI menjadi kebutuhan yang mendesak.

Secara normatif, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk desain kemasan dan karya kreatif lainnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) memberikan dasar hukum bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan merek sebagai identitas pembeda produk di pasar. Undang-undang ini dirancang tidak hanya untuk memberikan jaminan eksklusif kepada pemilik merek, tetapi juga sebagai bagian dari upaya negara dalam menciptakan iklim usaha yang adil, kompetitif, dan bebas dari praktik bisnis yang merugikan (Komariah & Anton, 2022). Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut serta melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau serupa pada jenis barang dan/atau jasa sejenis. Dengan demikian, perlindungan merek atas produk olahan bawang dapat mencegah praktik peniruan serta meningkatkan kepercayaan konsumen

Lebih lanjut, konsep nilai tambah (*value added*) dalam ekonomi pertanian menekankan pentingnya proses pengolahan dan branding dalam meningkatkan harga jual suatu komoditas. Strategi hilirisasi produk pertanian agribisnis ini melalui edukasi HKI dan pengembangan produk pengolahan dan penguatan merek merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Daya saing produk lokal, baik di tingkat domestik maupun internasional, dapat diperkuat melalui pengolahan produk. Dalam hal ini, bawang yang

diolah menjadi produk turunan seperti bawang goreng kemasan, pasta bawang, atau bumbu siap saji cenderung memiliki potensi pasar yang lebih besar dibandingkan penjualan dalam bentuk segar. Melalui inovasi, edukasi, serta pengembangan produk olahan, bawang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan agribisnis yang beragam dan bernilai jual tinggi. (Rahmawati & Dwi, 2021) Namun tanpa perlindungan HKI juga, inovasi tersebut rentan diklaim atau ditiru oleh pihak lain yang memiliki modal dan akses pemasaran lebih besar.

Permasalahan berikutnya adalah rendahnya literasi HKI dan terbatasnya pemahaman dan kemampuan petani dalam adopsi teknologi digital dalam manajemen koperasi menjadi kendala besar dalam memanfaatkan potensi pasar yang lebih luas. (Safi'i, 2024). di kalangan petani dan pelaku UMKM. tingkat pendaftaran merek oleh pelaku usaha mikro dan kecil masih relatif rendah dibandingkan potensi jumlah usaha yang ada. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai manfaat pendaftaran, persepsi bahwa prosesnya rumit dan mahal, serta minimnya pendampingan hukum di tingkat desa serta rendahnya pemahaman terkait pemasaran serta pengolahan produk yang dihasilkan. Akibatnya, tidak jarang terjadi kasus pencatutan nama, penjiplakan logo, bahkan gugatan hukum oleh pihak lain yang lebih dahulu mendaftarkan merek tersebut secara sah. Dan tidak dapat dimanfaatkannya hasil olahan produk dari para pelaku usaha dengan baik sehingga tidak dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai. Kondisi ini menggambarkan lemahnya kesadaran hukum dan akses informasi di kalangan pelaku UMKM. Akibatnya, banyak produk lokal yang beredar tanpa perlindungan hukum, pendistribusian produk yang sulit dijangkau. Diharapkan dengan adanya Rangkaian kegiatan yang dilakukan melalui pendampingan, penyuluhan dan pelatihan mengolah bawang pasca panen akan menjadi solusi bagi para petani dan juga sebagai pelaku UMKM juga. Petani bawang diharapkan tidak menyimpan lama-lama hasil pertaniannya karena sudah memiliki keterampilan dalam mengolah hasil pertaniannya dengan merubah bawang yang tersimpan di ulos agar diolah menjadi aneka hasil bawang yang dapat memiliki nilai jual. Sehingga dengan kemampuan teknis yang telah diberikan para petani memiliki kemampuan dan alternatif yang praktis, terciptanya hasil produksi bawang yang berguna sebagai konsumsi domestik rumah tangga.

Kondisi tersebut relevan dengan situasi di Desa Pabean, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, di mana potensi komoditas bawang cukup besar namun belum diimbangi dengan strategi perlindungan, dan pengembangan merek dan produk olahan serta pemasaran yang sistematis. Apabila tidak segera diatasi, maka produk-produk lokal

berisiko kehilangan identitas serta peluang ekspansi pasar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemberdayaan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan teknik budidaya saja, tetapi juga pada peningkatan kesadaran hukum dan kapasitas petani dalam memanfaatkan instrumen HKI sebagai strategi ekonomi dan perlindungan usaha. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi desa serta memperkuat posisi tawar petani dalam sistem pasar yang semakin kompetitif.

METHOD

Metode kegiatan ini disusun secara partisipatif dengan menempatkan petani dan pelaku UMKM bawang sebagai subjek utama dalam setiap tahapnya. Seluruh rangkaian mulai dari survey lapangan, penentuan kegiatan, penyuluhan dan pendampingan, hingga evaluasi dirancang untuk memastikan kegiatan berjalan terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan petani. Pendekatan ini memungkinkan proses pemberdayaan berlangsung lebih efektif melalui penguatan pengetahuan hukum Hak Kekayaan Intelektual, Pengembangan Produk Olahan Agribisnis, serta pemasaran berbasis digital.

Tabel 1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Pabean ,
Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.

Tahapan kegiatan	Metode pelaksanaan Kegiatan
Persiapan	Dalam tahap ini, dilakukan identifikasi serta analisis kebutuhan di lahan pertanian warga Desa Pabean melalui wawancara dan observasi kepada para petani yang memiliki usaha UMKM Bawang. Dari kegiatan wawancara dan observasi, diperoleh temuan berupa permasalahan bahwa masih banyak produk-produk olahan Agribisnis yaitu bawang masih banyak tidak didaftarkan HKI/Kepemilikan produk tersebut. Dan juga pemahaman terhadap hasil dari olahan bawang tersebut pelaku usaha masih bingung dalam mengembangkan produk olahan bawang yang terkesan hanya itu-itu saja sehingga kreatifitas yang dihasilkan masih kurang, disamping itu dalam hal memasarkan produknya salah satu faktanya adalah minim literasi terhadap teknologi pemasaran karena sekarang para UMKM menjual hasil produknya melalui E-Commerce sehingga hal ini berdampak kepada perekonomian masyarakat setempat.
Penentuan Kegiatan dan Metode Pendampingan.	Pada tahap ini, disusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan serta ditentukan metode yang akan diberikan kepada para UMKM Bawang di sekitar Desa Pabean. Penentuan metode dilakukan dengan mempertimbangkan tahapan kegiatan pendampingan yang akan dilakukan.
Pendampingan pendaftaran dan edukasi terhadap Hak Kekayaan Intelektual, edukasi pengembangan Pengolahan Hasil	Kegiatan ini mencakup pelaksanaan tahapan pendampingan yang dilakukan secara sistematis. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan meliputi: 1.Sosialisasi dan edukasi terkait HAKI serta pendampingan dalam pendaftaran merek produk 2.Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan 3.Implementasi teknologi pemasaran

Bawang dan Pemasaran Berbasis Teknologi.	4.Kegiatan pendampingan dan evaluasi 5.Partisipasi mitra UMKM bawang
Evaluasi dan Keberlanjutan Program	Penilaian dilakukan secara periodik untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan. Hasil evaluasi tersebut menjadi landasan dalam penyusunan rencana keberlanjutan program. Selanjutnya, pertemuan berkala dilaksanakan untuk memantau dan mengevaluasi keberlanjutan program pasca pelaksanaan kegiatan

RESULTS AND DISCUSSION

Dengan telah dilakukannya kegiatan sosialisasi pemberdayaan petani bawang melalui edukasi Hak Kekayaan Intelektual dan pengembangan produk olahan Agribisnis di Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo nantinya diharapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi para petani untuk dapat diberikan kepastian hukum dalam kepemilikan merek dan produk, dapat melakukan berbagai inovasi dan kreatifitas terhadap olahan hasil bawang serta pemasaran yang efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya dipakai beberapa metode yang saling mendukung antara lain dengan ceramah/penyuluhan untuk materi yang bersifat teori dan motivasi, peragaan untuk menyampaikan materi keterampilan, peragaan langsung oleh mitra dan pendampingan kegiatan (Putri, 2017).

Gambar 1. Sosialisasi Pemberdayaan Petani dan Edukasi Hak Kekayaan Intelektual



Sumber : Dokumentasi Kegiatan PkM 2020/2021

Kegiatan pemberdayaan petani bawang melalui edukasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan pengembangan produk olahan agribisnis dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu survey lapangan, penentuan kegiatan, penyuluhan dan pendampingan, hingga evaluasi. Tahapan awal dilakukan melalui survey lapangan lalu observasi dan identifikasi permasalahan yang dihadapi petani bawang, antara lain rendahnya nilai jual bawang saat panen melimpah, keterbatasan inovasi produk olahan, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya perlindungan HKI terhadap produk yang dihasilkan. Kondisi tersebut menyebabkan petani hanya menjual bawang dalam bentuk mentah dengan harga fluktuatif dan relatif rendah serta prosedur pemasaran yang dilakukan para pelaku UMKM bawang masih dirasa kuno karena tuntutan sekarang agar penjualan cepat dikenal oleh masyarakat salah satunya melalui pemahaman E-commerce. Pengembangan agribisnis melalui diversifikasi produk olahan menjadi salah satu strategi peningkatan nilai tambah komoditas pertanian serta keuntungan bagi pelaku UMKM dan pendapatan petani

Pada Tahap kegiatan, survey lapangan, observasi dan Identifikasi tim melakukan wawancara langsung kepada beberapa pelaku usaha UMKM bawang dan juga beberapa kepada petani bawang mengenai bagaimana perkembangan bawang mulai dari hasil yang dipanen oleh petani dan pengolahan dari hasil tersebut yang dimanfaatkan pelaku usaha UMKM untuk memperkenalkan produk olahan dari tempat asalnya. Pada tahap penentuan metode dan pendampingan, dilakukan perancangan secara sistematis terhadap berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, sekaligus menetapkan metode yang paling tepat untuk diterapkan kepada para petani sekaligus pelaku UMKM Bawang di sekitar Desa Pabean. Proses pemilihan metode dilakukan dengan partisipatif yaitu mempertimbangkan kebutuhan, kondisi, serta karakteristik UMKM setempat, sehingga kegiatan pendampingan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Metode yang dipilih juga disesuaikan dengan tahapan-tahapan kegiatan pendampingan yang telah direncanakan, mulai dari tahap awal identifikasi permasalahan, pemberian materi, hingga evaluasi hasil, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat saling terintegrasi dan memberikan dampak yang optimal bagi pengembangan usaha para pelaku UMKM tersebut.

Pendampingan pendaftaran dan edukasi terhadap Hak Kekayaan Intelektual, edukasi pengembangan Pengolahan Hasil Bawang dan Pemasaran Berbasis Teknologi, Pada kegiatan ini dilaksanakan setiap tahapan dalam proses pendampingan secara terstruktur dan berkelanjutan. Rangkaian kegiatan diawali dengan sosialisasi dan edukasi

mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), disertai dengan pendampingan dalam proses pendaftaran merek produk guna meningkatkan legalitas dan perlindungan usaha para pelaku UMKM. Selanjutnya, dilakukan penyuluhan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan wawasan serta keterampilan mitra UMKM dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. (Novita & Rahmawati, 2021)

Tim memberikan materi mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual, khususnya perlindungan merek, desain kemasan, dan identitas produk. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar petani sekaligus sebagai pelaku UMKM belum memahami manfaat HKI dalam melindungi produk dan meningkatkan daya saing. Setelah edukasi diberikan, petani mulai memahami bahwa merek dan kemasan dapat menjadi identitas usaha sekaligus perlindungan hukum. Perlindungan merek penting untuk membedakan produk satu dengan yang lain serta mencegah penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha pertanian (petani, kelompok tani, koperasi, atau UMKM) terhadap aspek hukum dalam dunia perdagangan. Dalam rangka untuk menciptakan desa yang tertib, berkeadilan, dan memiliki kepastian hukum yang kuat, program di bidang hukum difokuskan pada penguatan regulasi serta edukasi bagi masyarakat (Yuwono et al., 2025).

Selain itu penyuluhan yang dilakukan memberikan wawasan tentang aturan hukum yang mengatur kegiatan jual beli hasil pertanian, serta perlindungan terhadap penipuan atau praktik curang. Pembahasan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) penting untuk melindungi produk lokal, seperti merek, kemasan, dan inovasi pertanian. Tujuannya agar pelaku usaha memahami cara melindungi produk dan usahanya secara hukum. Dengan adanya sosialisasi dan edukasi ini bermanfaat untuk perlindungan hukum yang memadai, risiko tiruan atau pembajakan oleh pihak lain sangat tinggi sehingga dapat merugikan citra dan nilai ekonomi produk lokal (Atiyatunnajah et al., 2025). Kegiatan ini salah satunya juga membantu para pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan kepastian hukum dengan legalitas dari produknya untuk kita bantu untuk mendaftarkan produk atau mereknya ke DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual).

Tidak hanya itu, kegiatan juga mencakup penerapan teknologi sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha, baik dalam proses produksi maupun pemasaran. Tahapan berikutnya adalah pendampingan lanjutan yang diiringi dengan evaluasi secara berkala untuk menilai perkembangan dan efektivitas program yang telah dijalankan. Pada tahap evaluasi dan keberlanjutan Program, Evaluasi program dilakukan

secara berkala sebagai bagian penting dalam menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui evaluasi ini, berbagai faktor yang mendukung maupun yang menghambat keberlanjutan program dapat diidentifikasi secara lebih komprehensif. Hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam merumuskan rencana keberlanjutan program yang lebih efektif dan berorientasi jangka panjang. Selain itu, pertemuan berkala juga akan diselenggarakan sebagai sarana untuk memantau perkembangan program serta memastikan keberlanjutannya tetap terjaga, meskipun seluruh rangkaian kegiatan utama telah selesai dilaksanakan.

Pendampingan kegiatan ini dilakukan secara intensif selama 1–2 bulan untuk memastikan penerapan hasil dari kegiatan tersebut. Tim pendamping memonitor secara langsung bagaimana peserta menerapkan ilmu yang telah diperoleh, baik dalam aspek hukum, manajemen, maupun pemasaran. Pendampingan dilakukan melalui kunjungan lapangan, observasi, dan evaluasi hasil. Melalui pelatihan UMKM yang telah dilaksanakan tentunya memberikan inovasi dalam melakukan labelling yang dilakukan dengan menempelkan label pada setiap kemasan produk. Fungsi dari memberikan labelling atau tanda bertujuan untuk meningkatkan produk juga sebagai media agar lebih dikenal dan lebih mudah untuk ditemukan oleh orang (Hakim, et. Al., 2022)

Konsultasi berkala terkait masalah hukum, Pendaftaran merek/produk, pengolahan hasil bawang dan pemasaran. Peserta diberikan akses konsultasi dengan ahli (hukum, bisnis, pemasaran) untuk membantu menyelesaikan kendala nyata di lapangan. Konsultasi ini menjaga keberlanjutan dan efektivitas program ini bisa dilaksanakan jangka panjang.

CONCLUSION

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan petani bawang melalui edukasi Hak Kekayaan Intelektual dan pengembangan produk olahan agribisnis, dapat disimpulkan bahwa program ini telah berjalan secara sistematis melalui tahapan survei, perencanaan, penyuluhan, pendampingan, hingga evaluasi. Kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman petani dan pelaku UMKM mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya dalam perlindungan merek dan identitas produk, sehingga memberikan kepastian hukum serta meningkatkan daya saing produk di pasar.

Selain itu, melalui edukasi dan pendampingan, para petani dan pelaku UMKM mulai terdorong untuk melakukan inovasi dan diversifikasi produk olahan bawang guna meningkatkan nilai tambah komoditas. Penerapan teknologi dalam proses produksi dan

pemasaran juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi serta perluasan jangkauan pasar, termasuk melalui pemanfaatan media digital dan e-commerce. secara keseluruhan, program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membuka peluang pengembangan usaha yang lebih berkelanjutan. Dengan adanya evaluasi berkala dan pendampingan lanjutan, diharapkan program ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan petani serta pertumbuhan UMKM di daerah tersebut.

Lebih lanjut, keberhasilan program ini juga ditunjukkan melalui meningkatnya kesadaran hukum para pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas produk serta perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan merek oleh pihak lain. Partisipasi aktif dari petani dan pelaku UMKM dalam setiap tahapan kegiatan menjadi faktor penting yang mendukung tercapainya tujuan program secara optimal. Kedepan, keberlanjutan program ini memerlukan sinergi antara petani, pelaku UMKM, pemerintah, serta pihak pendamping agar inovasi dan pengembangan usaha dapat terus berjalan. Dukungan dalam bentuk akses permodalan, pendampingan berkelanjutan, serta perluasan jaringan pemasaran menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, diharapkan pemberdayaan ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menciptakan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

REFERENCES

- Apriyanto, C., Sulistiowati., & Hermi. (2013). KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES DALAM PEMBERDAYAAN PETANI BAWANG MERAH. *J. Polit. Gov. Stud*, 2(2), 64-79. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/2152>
- Atiyatunnajah, M., Nilnarohmah, N., & Marselia, V. (2025). PENYULUHAN HAK CIPTA DALAM MENGOPTIMALKAN EKSKLUSIVITAS DESAIN KEMASAN PRODUK PERTANIAN DI SANGGAR ROJOLELE, DELANGGU, KLATEN. *Jurnal Pengabdian Seni*, 6(1), 22–31. <https://doi.org/10.24821/jps.v6i1.15076>
- Cahyani, P. T., Shaleh, C., & Rasyid, F. A. (2025). KONTRIBUSI POLITIK EKONOMI PERTANIAN DALAM PENYEDIAAN BAHAN BAKU HALAL DI INDONESIA. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 111–125. <https://doi.org/10.55352/ekis.v7i1.1497>

- Hilman, Y. A., & Nimasari, E. P. (2018). MODEL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BERBASIS KOMUNITAS. *Aristo*, 6(1), 45–67. <https://doi.org/10.24269/ars.v6i1.778>
- Komariah, I., & Anton, A. (2022). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DENGAN MEMANFAATKAN BAWANG YANG TIDAK TERJUAL MENJADI PRODUKSI USAHA BAWANG GORENG ANEKA RASA. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 26-31. <https://doi.org/10.52434/jpm.v1i1.1795>
- Lukman Hakim, Junaidi, Erni Fidiyanti, Abdul Deni, Mia Regitasari, Asmaul Husna, Sepniar Yulanda, Khusnul Khotimah, 2022. *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENYULUHAN PENINGKATAN KINERJA UMKM DAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN NIB*. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.1, September 2022, pp 394-400. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v3i1.358>
- Meddiati Fajri Putri, FT PKK (2017) *MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGOLAHAN BAWANG MERAH BERBASIS MASYARAKAT*. In: Seminar Nasional 2017, Peran Pendidikan dalam Membangun Industri Kreatif Berbasis Kearifan Lokal, Semarang.
- Novita, D. D., & Rahmawati, W. (2021). INTRODUKSI MESIN PERAJANG DAN PENIRIS PADA PENGEMBANGAN USAHA PRODUKSI BAWANG GORENG KWT “SEJAHTERA” DI KECAMATAN GEDONG TATAAN, KABUPATEN PESAWARAN. *SAKAI SAMBAYAN—Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 44–49. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/30875>
- Parinsi, K. (2017). ANALISIS PENDAPATAN USAHA TANI BAWANG MERAH DI DESA SINGKI KECAMATAN ANGERAJA KABUPATEN ENREKANG. *Jurnal Economix*, 5(1), 193-202.
- Rahmawati, W., & Dwi, N. D. (2021). INTRODUKSI MESIN PERAJANG DAN PENIRIS PADA PENGEMBANGAN USAHA PRODUKSI BAWANG GORENG KWT” SEJAHTERA” DI KECAMATAN GEDOG TATAAN, KABUPATEN PESAWARAN. *Sakai Sambayan*, 5(1), 44–49.
- Riyanti, L. (2011). ANALISIS EFISIENSI EKONOMI PENGGUNAAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI PADA USAHATANI BAWANG MERAH VARIETAS BIMA DI KABUPATEN BREBES.

<https://agris.fao.org/search/en/providers/122376/records/6473918be0110688009757fd>

- Safi'i, A. (2024). MODEL KELEMBAGAAN UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH PRODUK KOPI DI KABUPATEN KARO. *JoTEC (Journal of Tropical Estate Crops)*, 2(2), 48–70. <https://doi.org/10.31289/jotec.v2i2.14371>
- Trimono, L., Hidayat, S., & Budiman, M. A. (2020). UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA TANI TEH RAKYAT MELALUI PEMBERDAYAAN WANITA PEDESAAN DI KECAMATAN CISURUPAN KABUPATEN GARUT. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(1), 193-204.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
- Yuwono, I., Sardiyono, S., Rahmanti, V. N., Putri, N. P., Rakhmawati, N. E., Yuwanti, D., & Sari, O. H. (2025). STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SUNGAI PINANG MELALUI PEMBENTUKAN DESA BINAAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS, SUMATERA SELATAN. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, 6(3), 1196-1220. <https://doi.org/10.26874/jakw.v6i3.836>